

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka tentunya memerlukan perlengkapan dan atribut kenegaraan. Dalam hal ini Indonesia terus berupaya memenuhi perlengkapan kenegaraan yang dibutuhkan seperti Presiden, Wakil Presiden, Konstitusi, Dasar Negara dan kelengkapan negara lainnya. “ Oleh karena itu pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) langsung mengadakan sidang yang pertama kali setelah Indonesia merdeka yang menghasilkan beberapa hal penting antara lain penetapan Sukarno sebagai Presiden dan Muhamad Hatta sebagai Wakil Presiden serta penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara “ ( Shodiq Mustafa, 2007 : 10 ).

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) mengadakan sidang lanjutan yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia ( KNI ), dan Badan Keamanan Rakyat ( BKR ) ( Shodiq Mustafa, 2007 : 13 ).

Dengan begitu bahwa perlengkapan negara sudah lengkap mulai dari Presiden, Wakil Presiden, KNI merupakan lembaga yang bertugas sebelum DPR/MPR

terbentuk, serta adanya Badan Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Meskipun Indonesia telah secara resmi merdeka akan tetapi Belanda dan sekutu masih menganggap Indonesia belum merdeka dan ingin menguasai kembali Indonesia. Tentara sekutu dan Belanda datang kembali ke Indonesia dengan alasan pemulihan keamanan. “ Kedatangan tentara sekutu ini mendapat reaksi keras dan penolakan dari bangsa Indonesia. Para pemuda dan pejuang di daerah mengadakan perlawanan perlawanan seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali dan beberapa daerah lainnya ” ( Shodiq Mustafa, 2007 : 40 ).

Periode tahun 1945 – 1950 biasa disebut masa Revolusi Nasional. Perang dengan taktik gerilya digunakan oleh pejuang Indonesia dalam menghadapi Belanda. Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia telah siap bersiaga melawan Belanda ( Anthony J.S Reid, 1996 : 2 ). Selain perlawanan melalui peperangan, perlawanan juga dilakukan melalui perundingan dan diplomasi. Perundingan tersebut antara lain perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan masih banyak perundingan lainnya yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan.

Perundingan demi perundingan telah dilakukan tetapi tidak pernah membuahkan hasil, Belanda selalu mengkhianati perjanjian yang telah disepakati. Seperti Perjanjian Linggarjati yang dihinati dengan melakukan Agresi Militer Belanda I, kemudian Perjanjian Renville yang dihinati dengan melakukan Agresi Militer Belanda II. Tercatat sudah dua kali Belanda melakukan Agresi Militer, Agresi Militer Belanda yang kedua dilakukan lebih besar dari pada Agresi Militer

Belanda yang pertama. Sasaran utama Agresi Militer Belanda II adalah ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1945 Belanda berhasil melakukan pengeboman di Yogyakarta serta mendaratkan pasukan terjun payung Nya. Tentara Nasional Indonesia telah mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jenderal Sudirman bangkit dari ranjang dimana beliau terbaring sakit untuk menyampaikan pesan melalui radio ( Anthony J. S Reid, 1996 : 263 ). Sebagai ibukota negara Yogyakarta memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan, akibat Agresi Militer Belanda II tersebut kota Yogyakarta berhasil direbut dan dikuasai oleh Belanda. Selain itu juga Belanda menahan dan mengasingkan tokoh nasional seperti Sukarno dan Muhamad Hatta ( Anthony J.S Reid, 1996 : 263 ). Belanda merasa senang karena telah menguasai ibukota negara dan telah menangkap orang yang sangat berpengaruh di Indonesia yaitu Sukarno dan Muhamad Hatta. Akan tetapi sebelum Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap Sukarno dan Muhamad Hatta, telah mengadakan rapat kabinet yang intinya adalah memberikan mandat kepada Mr.Sjafrudin Prawiranegara untuk segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) di Sumatera Barat.

Kota Bukit Tinggi dipilih sebagai pusat dan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) karena telah dipersiapkan pemerintah untuk dijadikan ibukota pemerintahan apabila terjadi serangan militer Belanda. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerintah telah membuat antisipasi yang menduga bahwa Belanda akan melakukan Agresi Militer yang kedua.

Pemimpin Republik yang di Jawa telah menduga kemungkinan Agresi Militer Belanda dan telah membuat rencana menghadapi kemungkinan itu, pada bulan November 1948 Wakil Presiden Muhamad Hatta mengajak Mr. Sjafrudin Prawiranegara Menteri Kemakmuran Republik Indonesia ke Bukit Tinggi dan ketika Muhamad Hatta kembali ke Yogyakarta, Mr. Sjafrudin Prawiranegara tetap tinggal untuk mempersiapkan kemungkinan pembentukan sebuah Pemerintahan Darurat di Sumatera seandainya ibukota Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda (Audrey Kahin, 2005 : 211 ).

Dengan demikian roda pemerintahan terus berjalan walaupun hanya Pemerintahan Darurat. Selain itu juga perlawanan dengan senjata terus dilakukan melalui strategi gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada awalnya akan dipimpin oleh Muhamad Hatta dan tugas Mr. Sjafrudin Prawiranegara ketika itu adalah hanya mempersiapkan dan setelah dipersiapkan dengan baik, kemudian Muhamad Hatta akan berangkat ke Bukit Tinggi.

Pertengahan Desember 1948 Perdana Menteri India, Jawarharlal Nehru mengirim sebuah pesawat untuk membawa Sukarno dan Muhamad Hatta ke luar Jawa, dalam perjalanan ke luar negeri pesawat itu singgah di Bukit Tinggi disini Muhamad Hatta akan tinggal untuk mengepalai pemerintahan Darurat, sementara Sukarno terbang ke New Delhi (Audrey Kahin , 2005 : 211 ).

Sukarno dan Muhamad Hatta gagal berangkat karena sebelum pesawat itu mendarat di Jawa, Belanda sudah melakukan Agresi Militer pada tanggal 19 Desember 1948.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia memegang kendali pemerintahan selama 7 bulan yaitu dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Meskipun Pemerintahan Darurat Republik Indonesia hanya berjalan selama 7 bulan tetapi telah menyelamatkan pemerintahan negara Indonesia dari kehancuran akibat terjadinya Agresi Militer Belanda II.

## **B. Analisis Masalah**

### **B.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta 19 Desember 1948
2. Mandat Presiden Indonesia kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat
3. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
4. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
5. Pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949

### **B.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian tidak terlalu luas jangkauannya dan memudahkan pembahasan dalam penelitian maka penulis membatasi permasalahan yaitu tentang Pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam bidang politik dan pertahanan keamanan.

### **B.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah

pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1948 - 1949?

### **C.Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **C.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam bidang politik dan pertahanan keamanan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1948- 1949.

#### **C.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi sejarah tentang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1948- 1949.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air dan dapat menghargai jasa para pahlawan.
3. Sebagai sumbangan pustaka yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat umum.

#### **C.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI)

Tipe penelitian yang digunakan adalah Tinjauan Historis yang bersifat deskriptif kualitatif

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah Pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam bidang politik dan pertahanan keamanan negara Indonesia

3. Tempat penelitian

Tempat Penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Daerah Lampung.

4. Bidang ilmu

Bidang Ilmu dalam penelitian ini adalah Sejarah.

5. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan tahun 2012-2013

## REFERENSI

Shodiq Mustafa.2007. *Wawasan Sejarah Indonesia Dan Dunia*. Solo : Tiga Serangkai hal.10

*Ibid.* halaman. 13

*Ibid.* halaman. 40

Anthony J.S Reid. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hal. 263

*Ibid.* halaman 263

Audrey Kahin. 2005. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 – 1998*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal.211

*Ibid.* Hal 211